

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

2.1.1 Welvin I Guna dan Arleen Herawaty(2010)

Welvin I Guna dan Arleen Herawaty (2010) meneliti tentang “*Pengaruh mekanisme good corporate governance, independensi auditor, kualitas audit dan factor lainnya terhadap manajemen laba*”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah menguji apakah terdapat perbedaan dalam perekayaan laba yang dilakukan manajemen sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*. Hasil dari penelitian tersebut adalah *leverage*, kualitas audit dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Welvin I Guna dan Arleen Herawaty(2010) adalah :

- a. Sama-sama membahas tentang *Good Corporate Governance* dengan manajemen laba.
- b. Sama-sama menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* sebagai sampel penelitian.
- c. Sama-sama menggunakan beberapa variabel yang termasuk dalam mekanisme *Corporate Governance* sebagai variabel independen dan manajemen laba sebagai variabel dependen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Welvin I Guna dan Arleen Herawaty(2010) adalah:

- a. Pada penelitian Welvin I Guna dan Arleen Herawaty(2010) menggunakan beberapa variabel penelitian lain seperti independensi auditor, *leverage*, kualitas audit, profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen.
- b. Pada penelitian Welvin I Guna dan Arleen Herawaty(2010) periode pengamatannya adalah tahun 2005-2008, sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode pengamatan tahun 2001-2008.

2.1.2 Bangun dan Vincent (2008)

Penelitian yang dilakukan oleh Bangun dan Vincent yang berjudul “Analisis Hubungan Komponen *Good Corporate Governance* Terhadap

Manajemen Laba Dengan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia“.Tujuan dari penelitian tersebut adalah menguji apakah terdapat hubungan antara komponen GCG terhadap manajemen laba dan hubungan antara komponen GCG terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah kepemilikan institusional tidak signifikan terhadap manajemen laba (DACC), kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, ukuran dewan komisaris tidak signifikan terhadap manajemen laba, dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, komponen GCG berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Bangun dan Vincent (2008) adalah :

- a. Sama-sama membahas tentang *Corporate Governance* dengan manajemen laba.
- b. Sama-sama menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan terdaftar dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) sebagai sampel penelitian.
- c. Sama-sama menggunakan beberapa variabel yang termasuk dalam mekanisme *Corporate Governance* yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen sebagai variabel independen dan manajemen laba sebagai variabel dependen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Bangun dan Vincent (2008) adalah:

- a. Pada penelitian Bangun dan Vincent (2008) menggunakan variabel dependen kinerja operasional perusahaan sedangkan pada perusahaan ini adalah kinerja operasional.
- b. Pada penelitian Bangun dan Vincent (2008) periode pengamatannya adalah tahun 2004-2006, sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode pengamatan tahun 2001-2008.

2.1.3 Werner R.Murhadi (2008)

Penelitian yang dilakukan oleh Werner R.Murhadi yang berjudul “*Studi Pengaruh Corporate Governance Terhadap Praktik Earnings Management*”. Tujuan penelitian tersebut adalah menguji apakah ada pengaruh antara *corporate governance* terhadap praktik *earnings management* pada suatu perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diuji dengan beberapa variabel meliputi komisaris independen, keberadaan komite audit, *CEO duality*, *top share* dan koalisi pemegang saham. Namun dari lima indikator GCG yang berpengaruh signifikan hanya dua yakni *CEO duality* dan *Top Share*.

Adapun variabel-variabel yang digunakan adalah :

- a. *Independent Board*(IB)
- b. Keberadaan komite audit(KA)
- c. *CEO Duality*(Dual)

- d. *Top Share* (TS)
- e. Koalisi pemegang saham (S2_5)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Werner.R.Murhadi (2008) adalah :

- a. Sama-sama menggunakan mekanisme *corporate governance* sebagai variabel independen.
- b. Sama-sama menggunakan praktik *earnings management* sebagai variabel dependen.
- c. Sama-sama menggunakan perusahaan yang terdaftar di BEI sebagai sampel penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Werner R.Murhadi (2008) adalah:

- a. Dalam penelitian WR.Murhadi menggunakan periode tahun 2005-2007, sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun 2001-2008
- b. Pada penelitian ini menggunakan variabel yang termasuk dalam mekanisme *corporate governance* yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen.

2.1.3 Muh.Arief dan Bambang Agus(2007)

Muh.Arief dan Bambang agus (2007)meneliti tentang”*Mekanisme Corporate Governance,Manajemen laba dan kinerja keuangan*”.Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh penerapan *good corporate governanceterhadap*

perilaku manajemen laba dan pengaruh manajemen terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap DAC, dan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap variabel ROA. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut antara lain:

- a. Variabel dependen:
 1. Manajemen laba
 2. Kinerja keuangan perusahaan
- b. Variabel independen :
 1. Kepemilikan Manajerial
 2. Kepemilikan Institusional
 3. Ukuran Dewan Komisaris
 4. Dewan Komisaris Independen

Persamaan penelitian ini dengan yang telah dilakukan Muh. Arief dan Bambang adalah :

- a. Sama-sama menggunakan *corporate governance*, *manajemen laba* dan *kinerja keuangan perusahaan* sebagai variabel penelitian.

- b. Sama-sama menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia(BEI) sebagai sampel penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muh.Arief dan Bambang (2007)

adalah:

- a. Pada penelitian Muh.Arief dan Bambang(2007)periode pengamatannya adalah tahun 2002-2004, sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode pengamatan 2001-2008.

2.1.5 Duwi Purwanti(2007)

Duwi Purwanti (2007) meneliti tentang”*Pengaruh mekanisme Corporate Governance terhadap Earnings Management*”. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap perilaku manajemen laba dan pengaruh manajemen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Duwi purwanti (2007) menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap perilaku manajemen laba. Penelitian menggunakan sampel pada perusahaan yang terdaftar di *Indonesia Capital Market Directory*(ICMD). Variabel yang digunakan antara lain :

- a. Variabel dependen yaitu manajemen laba
- b. Variabel independen yang meliputi:
 1. Kepemilikan manajerial
 2. Kepemilikan institusional
 3. Ukuran Perusahaan

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Duwi Purwanti (2007) yaitu :

- a. Sama-sama menggunakan *earnings management* dan *corporate governance* sebagai variabel penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Duwi Purwanti (2007) yaitu :

- a. Pada penelitian ini *earning management* dan kinerja operasional perusahaan sebagai variabel dependen sedangkan pada penelitian Duwi Purwanti hanya menggunakan *earnings management* sebagai variabel dependen.
- b. Pada penelitian Duwi Purwanti periode pengamatannya adalah tahun 2001-2005, sedangkan pada penelitian ini menggunakan menggunakan periode pengamatan tahun 2001-2008.

2.1.5 Halima Sathila (2006)

Halima Sathila meneliti tentang “ Analisis pengaruh kepemilikan, Praktik *Corporate Governance* dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba “. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kepemilikan, praktik *Corporate Governance* dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Halima Sathila (2006) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan, praktik *Corporate Governance* dan kompensasi bonus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian menggunakan

sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Variabel yang digunakan antara lain :

- a. Variabel dependen yaitu manajemen laba
- b. Variabel independen yang meliputi:
 1. Struktur kepemilikan
 2. Praktik *Corporate Governance*
 3. Kompensasi bonus

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Halima Sathila (2006) yaitu :

- a. Sama-sama menggunakan *Corporate Governance* sebagai variabel penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Halima Sathila (2006) yaitu :

- a. Pada penelitian ini *earning management* dan kinerja operasional perusahaan sebagai variabel dependen sedangkan pada penelitian Halima Sathila hanya *earnings management* sebagai variabel dependen.
- b. Pada penelitian Halima Sathila periode pengamatannya adalah tahun 2004-2006, sedangkan pada penelitian ini menggunakan menggunakan periode pengamatan tahun 2001-2008.

2.1.6 Deni Darmawati dan Khomsiyah(2005)

Deni Darmawati dan Khomsiyah meneliti tentang “*Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Operasional Perusahaan*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi keterkaitan *corporate governance* yang diterapkan dalam suatu perusahaan dengan kinerja operasional perusahaan yang bersangkutan dan bertujuan untuk menguji kembali penelitian–penelitian sebelumnya Hasil dari penelitian tersebut variabel GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut antara lain:

- a. Variabel dependen yaitu Kinerja operasional perusahaan
- b. Variabel independen yaitu *Corporate governance*

Persamaan penelitian ini dengan yang telah dilakukan Deni Darmawati dan Khomsiyah (2005) adalah:

- a. Sama-sama menggunakan kinerja perusahaan dan *good corporate governance* sebagai variabel penelitian.
- b. Sama-sama menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) sebagai sampel penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Darmawati dan Khomsiyah adalah:

- Pada penelitian Darmawati dan Khomsiyah periode pengamatannya adalah tahun 2001-2002, sedangkan pada penelitian ini menggunakan
- periode pengamatan 2001-2008.

2.1.7 Gideon Sb.Boediono (2005)

Gideon Sb.Boediono meneliti tentang “ Studi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba“. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme *Corporate Governance* dan dampak Manajemen laba.Hasil penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2005) menunjukkan bahwa mekanisme kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba.Penelitian menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Variabel yang digunakan antara lain :

- c. Variabel dependen yaitu manajemen laba
- d. Variabel independen yang meliputi:
 - 1. Kepemilikan Institusional
 - 2. Kepemilikan Manajerial
 - 3. Ukuran Dewan Komisaris

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Boediono (2005) yaitu :

- b. Sama-sama menggunakan *Corporate Governancedan* Manajemen Laba sebagai variabel penelitian.

Perbedaan penelian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Boediono(2005) yaitu :

- c. Pada penelitian Halima Sathila periode pengamatannya adalah tahun 1996-2002, sedangkan pada penelitian ini menggunakan menggunakan periode pengamatan tahun 2001-2008.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep *Good Corporate Governance*

Dua teori yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham dimana fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sesuatu atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa sesuatu yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya (UU Jaminan Fidusia). Sehingga dapat dikatakan bahwa *stewardship theory* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya. Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang profesor dari Harvard, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai *agent* bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang

bijaksana dan adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship models*. Sudut pandang yang diberikan pada *agency theory* adalah memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya berbeda dengan sudut pandang dari *stewardship theory*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep *corporate governance* ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*. Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance* yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*.

Indonesia mulai menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* sejak menandatangani *Letter Of Intent* (LOI) dengan IMF yang salah satu bagian terpentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar *good corporate governance* yang diterapkan di tingkat internasional. Pada April 2001 Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policies*) mengeluarkan Kode Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*The Indonesian Code for Good Corporate Governance*) bagi masyarakat

bisnis Indonesia. Dalam *Indonesian Code for Good Corporate Governance* tersebut dimuat hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Pemegang saham dan hak mereka
- b. Fungsi dewan komisaris perusahaan
- c. Fungsi direksi perusahaan
- d. Sistem audit

2.2.2 Definisi *Corporate Governance*

Corporate Governance adalah suatu cara atau sistem untuk mengelola perusahaan dengan tujuan untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk stakeholders (Khomsiyah, 2006). Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya dan *stakeholders* pada umumnya.

Sedangkan menurut (Hessel Nogi, 2003) mendefinisikan *Good Corporate Governances* sebagai berikut:

Suatu struktur untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta mengalokasikannya ke berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, supplier, konsumen, pemerintah dan masyarakat luas.

Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian *corporate governance* dibawah ini dikutip dari berbagai sumber:

- a. Dalam keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN disebutkan bahwa tiga prinsip yang harus dipegang dalam

pengelolaan institusi ekonomi di lingkungan BUMN dalam menerapkan *good corporate governance* adalah transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.

b. OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*)

Mendefinisikan corporate governance sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, dan pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

c. GCG Workshop kantor Meneg. PM BUMN

Good Corporate Governance berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung :

- a. Pengembangan perusahaan.
- b. Pengelolaan sumberdaya dan resiko secara lebih efisien dan efektif.
- c. Pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders*.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa definisi dari *Good Corporate Governance* adalah seperangkat aturan, prinsip, atau sistem dan struktur untuk mengendalikan perusahaan sebagaimana sebagai suatu alat untuk meningkatkan nilai perusahaan GCG juga menjadi penghubung masing-masing pemilik kepentingan atas hak dan kewajibannya.

Agar penyelenggaraan *corporate governance* berjalan dengan baik, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan antara lain :

1. Bapepam dengan Surat Edaran No.SE-03/PM/2000,masyarakat bahwa setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk Komite Audit dengan anggota minimal 3 orang yang diketuai oleh satu orang komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi keuangan.
2. Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002,menyatakan bahwa komisaris/Dewan pengawas harus membentuk komite yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya,yaitu membantu dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern,efektifitas pelaksanaan tugas auditor internal.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

The OECD Principles of Corporate Governance yang dikembangkan oleh OECD mencakup empat hal berikut ini :

a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*the rights of stakeholders*)

Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham yaitu :

1. Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan.

2. Hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham.
3. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur.
4. Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS.
5. Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi.

b. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (the equitable treatment of shareholders)

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing.

c. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (the role of stakeholders)

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

d. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (the responsibilities of the board)

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategi perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap

manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan.

Prinsip GCG sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No.II7/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN sebagai berikut :

1). Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

2). Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

3. Keterbukaan (*transparency*)

Dalam prinsip ini informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

4. Kewajaran (*fairness*)

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

5. Kemandirian (*independency*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

2.2.4 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), manfaat yang diperoleh antara lain :

1. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen bagi BUMN dan dapat menambah penerimaan bagi APBN.
2. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
3. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
4. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.5 Implementasi Beserta Implikasinya

Apakah perusahaan telah mengimplementasikan konsep *Good Corporate Governance* atau tidak maka dapat dievaluasi sejauh mana perusahaan tersebut mengimplementasikan prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang meliputi :

1. Hak-hak pemegang saham
2. Perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham
3. Peranan *stakeholders* dalam *Corporate Governance*.
4. Pengungkapan dan Transparansi

5. Tanggung jawab direksi dan komisaris

Hambatan ataupun kendala dalam penerapan *Corporate Governance* yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan konsep *Corporate Governance* meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Konsentrasi kepemilikan yang tinggi
2. Pengawasan Dewan Komisaris yang kurang efektif.
3. Pemegang saham yang pasif dan pengawasan kurang efektif

Penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan diharapkan mampu menghasilkan suatu manfaat yang diperoleh yaitu :

1. Melancarkan akses terhadap pendanaan.
2. Perlindungan Direksi/Manajemen terhadap gugatan hukum.
3. Meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan kepercayaan publik.
5. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja operasional perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* bagi BUMN.

2.2.6 Mekanisme *Corporate Governance*

Corporate Governance merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa pemegang saham dan pemberi pinjaman dari perusahaan memperoleh *return* yang meliputi mekanisme internal (struktur dewan direksi dan kepemilikan manajerial) dan mekanisme eksternal (kepemilikan institusional).

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial yaitu presentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yang terdiri dari komisaris dan direksi, sehingga kepentingan pemilik dan pemegang saham akan dapat disejajarkan. Menurut Madiastuty dan Machfoedz (2003), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat membatasi perilaku oportunistik manajer dalam bentuk *earnings management*.

2. Kepemilikan Institusional

Menurut Femmy (2007), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuan monitor manajemen. Artinya, semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. Menurut Jiambavo et al (1996) terdapat efek feedback dari kepemilikan institusional yang dapat mengurangi pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. Jika pengelolaan laba tersebut efisien maka kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengelolaan laba, tetapi jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunistik maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi *earning management*.

3. Ukuran dewan komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Dewan komisaris perusahaan bertanggungjawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen dan memberikan nasehat kepada manajemen

ketika dipandang perlu oleh dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan.

4. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan.

2.2.7 Definisi *Corporate Governance Perception Indeks*

Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah riset dan pemeringkatan penerapan GCG di perusahaan publik yang tercatat di BEJ. Pelaksanaan CGPI dilandasi oleh pemikiran tentang pentingnya mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan publik telah menerapkan GCG. Hasil riset dalam pemeringkatan yang telah dilakukan menunjukkan adanya proses pendekatan, penjabaran, penerapan dan penyempurnaan secara berkelanjutan prinsip-prinsip GCG, sehingga dapat diungkap permasalahan yang seringkali muncul dan konsistensi kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Selain tetap menjalin kerjasama dengan Majalah SWA, yang dikenal sebagai salah satu majalah bisnis yang unggul di Indonesia, IICG juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, serta Bursa Efek Jakarta (BEJ).

KADIN Indonesia memiliki Komite Tetap GCG sebagai salah satu upaya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan dinamis. Pembentukan komite ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mensosialisasikan pencapaian pelaksanaan GCG di Indonesia. Sosialisasi ini bukan saja bermanfaat bagi para investor dan komunitas bisnis nasional tetapi juga internasional sebagai salah satu acuan untuk melakukan investasi. Selain itu dapat dimanfaatkan sebagai fakta bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia layak mendapatkan kepercayaan dari para investor dan kreditor luar negeri. Diharapkan kepercayaan dari para investor dan kreditor dapat meningkatkan arus investasi sebagai modal dalam sektor riil, sehingga mampu mendorong pemulihan ekonomi di Indonesia. Kerjasama KADIN, BEJ dan IICG dalam pemeringkatan CGPI menjadikan sosialisasi dapat dilaksanakan secara lebih gencar, karena berdasarkan hasil riset yang kredibel. Adapun kriteria penilaian CGPI yang digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut :

1. **Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan** adalah suatu sistem manajemen yang mendorong anggota perusahaan untuk menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.
2. **Tata Kelola Dewan Komisaris** adalah sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota dewan komisaris dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.

3. **Komite-komite Fungsional** merupakan sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota komite-komite fungsional dalam membantu penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.
4. **Direksi** adalah sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota direksi dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.
5. **Transparansi** adalah sistem manajemen yang mendorong adanya pengungkapan (termasuk akses) informasi yang relevan, akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, tentang kegiatan perusahaan.
6. **Perlakuan terhadap Pemegang Saham** adalah sistem manajemen yang menjamin perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham dan calon pemegang saham.
7. **Peran pihak berkepentingan lainnya** adalah sistem manajemen yang dapat meningkatkan peran pihak berkepentingan lainnya.

2.2.8 Konsep Manajemen Laba

Istilah manajemen laba mungkin tidak asing bagi orang-orang yang bekerja di bidang manajemen dan akuntansi, baik praktisi maupun akademisi. Apabila kita berbicara tentang manajemen laba, bahasan kita tidak akan lepas dari suatu teori akuntansi yang terkait dengan manajemen laba yaitu *positive accounting theory*.

Dalam buku Watts dan Zimmermandalam Tatang Ary Gumanti (2000) yang berjudul "*Positive Accounting Theory*" memaparkan suatu teori akuntansi yang

berusaha mengungkapkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu atau ciri-ciri suatu unit usaha tertentu dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan perusahaan. Tiga hipotesis motivasi manajemen laba dalam *Positive Accounting Theory* antara lain :

1. *The bonus plan hypothesis*

Motivasi bonus merupakan dorongan manajer perusahaan dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut. Manajemen cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba, dengan demikian bonus yang akan diterima oleh manajemen akan semakin besar.

2. *The debt covenant hypothesis* (hipotesis perjanjian hutang)

Hipotesis ini memprediksikan bahwa manajer ingin meningkatkan laba dan aktiva untuk mengurangi biaya reegosiasi kontrak utang ketika perusahaan memutuskan perjanjian utangnya. Tidak seperti investor yang ada, kreditor yang ada tidak memiliki mekanisme untuk meningkatkan laba mereka. Meskipun demikian, kreditor mungkin dilindungi oleh standar akuntansi yang konservatif.

3. *The political cost hypothesis* (hipotesis biaya politik)

Para peneliti akuntansi menyatakan bahwa perusahaan besar lebih sensitive dari pada perusahaan kecil, karena terkait dengan biaya politis dan oleh karenanya perusahaan tersebut menghadapi insentif yang berbeda dalam pemilihan prosedur metode akuntansi. Hipotesis biaya politik memprediksikan bahwa manajer ingin mengecilkan laba untuk

mengurangi biaya politis yang potensial. Semakin besar biaya politis yang dihadapi perusahaan, maka semakin cenderung manajer memilih prosedur akuntansi yang melaporkan laba yang lebih rendah.

2.2.9 Definisi Manajemen Laba

Manajemen laba adalah campur tangan manajer dalam penyusunan dan dan pelaporan keuangan perusahaan untuk mencapai tingkat laba tertentu dan juga pilihan yang dilakukan oleh manajer untuk kebijakan akuntansi untuk mencapai suatu tujuan yang spesifik. Menurut Rosenzweig dan Fischer dalam Tatang Ary Gumanti (2000) mengartikan manajemen laba sebagai *“The actions of manager that are intended to increase or decrease current reported earning of the unit for which the manager is responsible without generating a corresponding increase or decrease in the long-term economic profitability of the unit”*. Dalam hal ini, manajemen laba senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk mengatur pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu.

2.2.10 Bentuk-bentuk Manajemen Laba

Dibawah ini merupakan berbagai praktik *earnings management* yang sering dilakukan perusahaan meliputi (Abdelghany, 2005).

a. Big Bath

Yang berarti pengakuan terhadap biaya dilakukan melalui *one time restructuring charge*. Dimana hal ini akan berakibat perusahaan akan mengalami pembebanan biaya secara besar-besaran pada tahun ini dan dampaknya pada tahun berikutnya perusahaan akan mengalami profit yang besar.

b. *Income Smoothing*

Didefinisikan sebagai alat yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi jumlah variabilitas laba yang dilaporkan untuk tujuan tertentu dengan cara memanipulasi variabel artificial.

b. *Taking a Bath*

Dilakukan dengan cara mengakumulasi semua kerugian di masa depan ke periode berjalan agar laba di masa depan meningkat atau menunda pendapatan di periode berjalan untuk diakumulasikan ke pendapatan masa depan untuk meningkatkan laba di masa depan.

c. *Income minimization*

Dilakukan dengan membuat kebijakan yang berupa penghapusan atas barang modal atau aktiva tak berwujud, riset dan pengembangan yang cepat dengan tujuan untuk mencapai tingkat pengembalian modal tertentu.

e. *Cookie Jar*

Yaitu dalam periode kondisi keuangan yang baik maka perusahaan dapat mengurangi *earnings management* dengan melakukan pencadangan yang lebih banyak, pembebanan biaya yang lebih besar.

f. *Voluntary accounting changes*

Dilakukan dengan mengubah kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan.

2.2.11 Definisi Kinerja Perusahaan

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi organisasi. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja dan semua aktivitas dan sumberdaya yang perlu dipertanggungjawabkan. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain terkonsentrasinya kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan laporan keuangan (Pranata, 2007).

Kinerja perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap masa depan perusahaan, kemudahan dalam memperoleh kreditur dan juga dapat mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya. Informasi mengenai kinerja perusahaan sangat dibutuhkan oleh banyak pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, karena informasi tersebut sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi.

Kinerja perusahaan dibedakan menjadi:

1. Kinerja Operasional Perusahaan

Kinerja operasional perusahaan dapat diartikan sebagai prestasi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan operasionalnya dalam suatu periode tertentu. Kinerja operasional dapat dinilai dengan melakukan analisa terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini rasio keuangan perusahaan yang digunakan adalah rasio profitabilitas.

2. Kinerja Pasar Perusahaan

Dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi harga saham di pasar dalam suatu periode tertentu. Kinerja pasar perusahaan dapat dinilai dengan melihat kinerja saham di pasar modal. Namun dalam penelitian ini hanya melakukan pengukuran terhadap kinerja operasional perusahaan tanpa pengukur kinerja pasar perusahaan.

2.2.12 Tujuan Pengukuran Kinerja Perusahaan

Tujuan dari pengukuran kinerja perusahaan antara lain:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek.
3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan laba perusahaan selama periode tertentu.

2.2.13 Pengukuran Kinerja Operasional

Pengukuran kinerja operasional perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Return On Assets*(ROA)yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap total asset.

a. *Return On Assets (ROA)*

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio *Return On Assets* (ROA) yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola assets perusahaan dengan perolehan laba bersih,artinya bahwa perusahaan mampu menggunakan aktiva yang ada untuk memperoleh laba yang besar sehingga perusahaan dapat mengembalikan investasi yang tertanam dalam aktiva perusahaan.Rasio ini mengukur profitabilitas dari sudut pandang manajer.ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Earnings After Tax}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2.2.14 Hubungan *Corporate Governance*,Manajemen Laba dan Kinerja Operasional Perusahaan

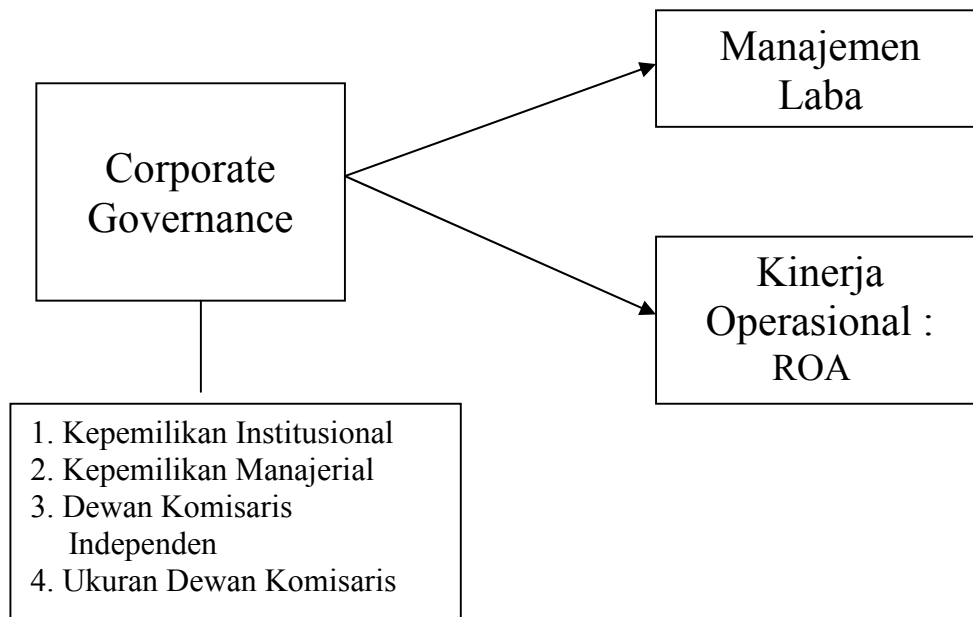
Menurut teori keagenan,adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan,yaitu ketidak sejajaran kepentingan antara *principal*(pemegang saham)dan *agent*(manajer).Berkaitan dengan masalah keagenan,*corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan,diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas

dana yang telah mereka investasikan. *Corporate Governace* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk mencapai sasaran tersebut dan sebagai sarana untuk monitoring kerja. *Corporate governance* harus memerikan insentif yang tepat untuk dewan direksi dan manajemen dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan dari sisi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham. sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumberdaya secara efisien.

2.3 **Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh penerapan *corporate governance* pada perilaku manajemen laba dan kinerja operasional pada perusahaan manufaktur yang telah menerapkan *Corporate Governance* yang terdaftar dalam *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Landasan teori terkait dalam penelitian ini yang sudah dijelaskan dan berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dilihat bahwa *corporate governance* dianggap sebagai suatu kebijakan yang akan menimbulkan kinerja perbaikan yang lebih baik (*Good Corporate Governance*) melalui dua indikator yaitu manajemen laba dan kinerja operasional perusahaan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang akan diteliti, selanjutnya hipotesis dalam penelitian ini harus diuji dengan pembuktian dan kebenaran berdasarkan fakta. Penerapan *good corporate governance* dipercaya dapat mengurangi adanya praktik *earnings*

management yang bersifat oportunistik dan perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* secara baik akan memiliki kinerja operasional yang lebih baik pula. Berdasarkan kerangka penelitian dan konsep penyusunan hipotesis yang telah dibuat, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh Positif terhadap praktik *Earnings Management*.
- H₂ : Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh Positif terhadap kinerja operasional perusahaan.